

Perspektif Konstruktivisme dalam Diplomasi Indonesia pada *Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)*

Leonard Felix Hutabarat, Universitas Kristen Indonesia

Corresponding e-mail: Lfhutabarat@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan bagaimana Indonesia menanggapi inisiatif Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pembentukan *Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)* pada tanggal 23 Mei 2022. Terminologi Indo-Pasifik tumbuh dari konstruksi geopolitik kawasan untuk mengakomodasi kepentingan keamanan dan politik internasional. Berbagai strategi konektivitas telah membagi kepentingan berbagai negara dalam inisiatif untuk bekerjasama. Kebutuhan antar negara di kawasan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi harus menjadi prioritas bersama, terutama dalam mencegah terjadinya polarisasi di kawasan dan meminimalisasi terjadinya konflik terbuka antara negara adidaya beserta sekutunya. Aspek geopolitik dan geostrategis harus disikapi secara rasional oleh Indonesia. Artikel ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Indonesia dalam melihat inisiatif Amerika Serikat dalam berbagai dimensi kepentingan yang lebih luas. Kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia terhadap IPEF dapat dilihat dari perspektif konstruktivisme dalam studi hubungan internasional. Tulisan ini didasarkan pada metode kualitatif dengan menjelaskan kepentingan terkait pilar yang ditawarkan AS dalam IPEF. Berdasarkan kepentingan nasional Indonesia, diplomasi yang dilakukan bersifat strategis dalam upaya untuk melakukan pertimbangan kepentingan (*balance of interests*) kerja sama ekonomi antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, keterlibatan dalam pembentukan *policy framework* dan *norms setting* atau *cooperative mechanism* bagi negara berkembang di kawasan, serta upaya untuk memperjuangkan kepentingan sentralitas ASEAN sesuai *ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)*.

Kata Kunci

Diplomasi, *Economic Framework*, geopolitik, Indo-Pasifik, konstruktivisme

Pendahuluan

Partisipasi Indonesia pada *Indo-Pacific Economic Framework / IPEF* (The House, 2022) merupakan salah satu komitmen Indonesia dari hasil kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Amerika Serikat dalam rangka ASEAN-US *Special Summit 2022* (ASEAN, 2022) pada bulan Mei 2022 lalu. IPEF merupakan inisiatif Presiden AS Joe Biden dalam rangkaian kunjungannya ke Korea Selatan dan Jepang. Presiden Amerika Serikat (AS) secara resmi telah meluncurkan kerangka kerja sama *Indo-Pacific Economic Framework* atau IPEF pada tanggal 23 Mei 2022. Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan yang hadir secara virtual pada sesi diskusi. Negara-negara yang menjadi peserta IPEF adalah Amerika Serikat (pemrakarsa), Australia, Fiji, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru serta 7 (tujuh) negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Seluruh negara-negara tersebut juga merupakan mitra dagang strategis Indonesia.

Negara-negara peserta IPEF tersebut di atas adalah negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan yang dinamakan Indo-Pasifik ini diproyeksikan akan menjadi masa depan perekonomian dunia dengan perkiraan nilai GDP gabungan dari negara-negara peserta IPEF yang mewakili 40% dari PDB global. Ditambah dengan lebih kurang mencapai 60% penduduk dunia berada di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan Indo-Pasifik ini diperkirakan akan menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan global selama tiga dekade mendatang (CNBC, 2022).

Indo-Pasifik tumbuh dari konstruksi geopolitik kawasan untuk mengakomodasi kepentingan keamanan dan politik internasional (Yadav, 2022). Berbagai strategi konektivitas telah membagi kepentingan berbagai negara dalam inisiatif untuk bekerjasama. Kebutuhan antar negara di kawasan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi harus menjadi prioritas bersama, terutama dalam mencegah terjadinya polarisasi di kawasan dan meminimalisasi terjadinya konflik terbuka antara negara adidaya beserta sekutunya. Aspek geopolitik dan geostrategis harus disikapi secara rasional oleh Indonesia.

Politik global saat ini masih didominasi negara-negara yang liberal, kapitalis, dan demokratis. Tatanan dunia masih didukung jaringan aliansi yang dipimpin AS, institusi, tawar-menawar geopolitik, dan kemitraan demokrasi. Meskipun terdapat variasi yang luas dari model ekonomi politik yang ada dari *social democratic*, neoliberal, dan *state capitalist*, stabilitas pemerintahan masih tergantung dari tatanan ini. Hubungan internasional saat ini adalah pencarian sumber daya dan perdagangan, proteksi kedaulatan nasional, dan jika mungkin adalah dominasi regional. Jika ini yang terjadi dalam kancah global, dunia masih akan menyaksikan strategi AS di berbagai kawasan melalui perdagangan, aliansi, institusi multilateral, dan diplomasi (Hutabarat, 2014).

Kerangka kerja sama IPEF dimaksudkan guna memajukan ketahanan, keberlanjutan, inklusivitas, pertumbuhan ekonomi, keadilan, dan daya saing bagi perekonomian negara-negara peserta. Melalui inisiatif ini diharapkan adanya kontribusi pada kerja sama stabilitas, kemakmuran, pembangunan, dan perdamaian di kawasan (The House, 2022). Sebagai bagian dari kebijakan dan strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat dalam bentuk *economic engagement* dan *leadership presence* AS di kawasan dalam menghadapi Republik Rakyat Tiongkok (RRT), IPEF memiliki karakteristik utama, yaitu untuk membuat sebuah *regional trade norms* dan *regulatory regimes*, dan bukan dalam bentuk penurunan tarif dan meningkatkan akses pasar. Dalam konteks ini, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perdagangan dalam peluncuran IPEF menekankan bahwa IPEF harus berorientasi pada program konkret, bersifat inklusif, dapat bersinergi dengan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific / AOIP* (ASEAN, 2019), dan tidak menciptakan tantangan baru. Berdasarkan kepentingan nasional Indonesia, diplomasi yang dilakukan bersifat strategis dalam upaya untuk melakukan perimbangan kepentingan (*balance of interests*) kerja sama ekonomi antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, keterlibatan dalam pembentukan *policy framework* dan *norms setting* atau *cooperative mechanism* bagi negara berkembang di kawasan, serta upaya untuk memperjuangkan kepentingan sentralitas ASEAN sesuai *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP). Diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap IPEF merujuk pada perspektif konstruktivisme Alexander Wendt dalam *Kantian culture*.

Tinjauan Pustaka

Selama beberapa dekade, teori hubungan internasional didominasi dua pendekatan: realisme dan liberalisme. Konstruktivisme telah mengalami marginalisasi oleh kedua perspektif utama ini karena difokuskan pada konstruksi sosial (*social construction*) daripada konstruksi material (*material construction*) (Barkin, 2000). Perubahan terjadi pada akhir tahun 1980-an saat runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin dimana mulai dipertimbangkannya

kapasitas eksplanatoris dari “*mainstream theories*” (Hopf, 1998). Sejak saat itu, debat baru berkembang. Dalam kaitan ini, perkembangan teori konstruktivis Alexander Wendt memperoleh perhatian akademisi (Lapid, 1989). Wendt mempublikasikan “*Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*” tahun 1992. Dalam tulisannya Wendt menyatakan keterbatasan dari konsep anarki dari teori neorealis dan neoliberalis dalam menjelaskan hubungan internasional (Wendt, 1992). Pada tahun 1999 Wendt lebih lanjut mengembangkan *Social Theory of International Politics*. Wendt menyatakan hal utama dari materialisme dan individualisme, dan “*scientific methods of social inquiry*” (Jackson & Sorensen, 2007, p. 162).

Wendt menegaskan pentingnya “*shared ideas*” (*knowledge*) dalam hubungan internasional dalam konteks teori Wendt. Menurut Wendt “*socially shared knowledge is knowledge that is both common and connected between individuals*”. Wendt menekankan “*the structures of human association are determined primarily by shared ideas rather than material forces*”. Wendt menolak pandangan bahwa “*the structures of human association are constructed by material phenomena*” sebagaimana didefinisikan oleh teori neorealisme dan neoliberalisme. Wendt tidak menyangkal adanya fakta obyektif. Elemen material ada dan tidak dapat disangkal. Menurut Wendt “*shared ideas are the most important elements in international relations*”

Lebih lanjut, Wendt menegaskan bahwa “*the identities and interests of purposive actors are constructed by these shared ideas rather than given by nature*”. Dalam menentukan prinsip kepentingan nasional, perspektif realis dan liberalis dalam hubungan internasional didasarkan pada faktor-faktor material. Namun konstruktivisme Wendt meyakini kepentingan nasional dikonstruksi oleh “*shared ideas*”, daripada “*material factors*”. Dalam konteks ini segala sesuatu memiliki dasar materi, contohnya badan bagi manusia, dan wilayah bagi negara. Namun yang sesungguhnya membedakan aktor-aktor ini dengan identitas yang berbeda adalah “*shared ideas*”, seperti “*consciousness and memory*”.

Alexander Wendt melakukan kategorisasi identitas ke dalam 4 (empat) jenis: (1) individu (*person*) atau korporasi, (2) jenis (*type*), (3) peran (*role*), dan (4) kolektif. Identitas individu atau korporasi terdiri “*self-organizing, homeostatic structures*” yang membedakan aktor-aktor dari entitas lain. Wendt menjelaskan jenis sebagai label atau kategori sosial yang sesuai bagi individu yang memiliki satu atau beberapa karakteristik yang sama, dalam konteks “*appearance, behavioral features, attitudes, values, skills (language), knowledge, opinions, experiences, historical similarities (such as region or place of birth)*”. Identitas peran tergantung pada budaya. Identitas kolektif adalah hubungan antara diri sendiri dan yang lain sebagai konklusi logis, yang disebut identifikasi. Identitas kolektif adalah kombinasi yang unik dari *role identity* dan *type identity*. Identitas ini memiliki *causal power* yang mempengaruhi aktor untuk mendefinisikan kepentingan yang lain sebagai bagian dari *self-interest*.

Dalam konteks kepentingan nasional, Wendt berbeda pandangan dengan teori neorealis. Jika Waltz memiliki asumsi kepentingan satu-satunya bagi negara adalah “*survival*” (Waltz, 1979), maka Wendt sebaliknya meyakini kepentingan nasional memiliki empat tujuan, yaitu: *survival, autonomy independence, economic well-being* dan *collective self-esteem* (Wendt, 1999, pp. 235-237). Menurut Wendt perilaku negara tergantung pada kepentingan negara tersebut. Dengan demikian, menurut perspektif konstruktivisme Wendt, tindakan aktor juga dipengaruhi oleh “*shared ideas*”. Untuk menjelaskan hubungan antara “*idea, identity, interest and action*”, dapat digunakan *theory of rational choice* sebagai referensi. Dalam teori ini terdapat formula yang disebut “*intentional equation*” : $Desire + Belief = action$, dimana identitas adalah keyakinan (*belief*) dan kepentingan adalah “*desire*”. Dengan demikian, identitas dan kepentingan akan mempengaruhi tindakan. Identitas adalah syarat untuk kepentingan karena aktor tidak dapat mengetahui apa yang diinginkannya sebelum mengetahui siapa dirinya

(Wildavsky, 1994). Kepentingan dan identitas juga saling mempengaruhi satu sama lain. Tanpa kepentingan, identitas tidak memiliki “*motivational power*”; tanpa identitas, kepentingan tidak memiliki arah (Wendt, 1999, p. 231). Secara umum, menurut konstruktivisme Wendt, identitas dan kepentingan terdiri atas *shared ideas and the material forces in the system*. Identitas adalah syarat untuk kepentingan, dan keduanya saling mempengaruhi dan menentukan perilaku atau tindakan.

Bagi teori rasional dalam hubungan internasional, saat identitas suatu negara ditentukan maka kepentingan nasionalnya juga akan tetap atau pasti. Dalam mengejar kepentingan suatu negara, hubungan antar negara adalah bersifat bermusuhan atau pada dasarnya dalam suasana konflik. Dalam konteks ini, *social conceptualizations of structure* ditolak dalam teori Waltz, dan hubungan internasional hanya dalam satu skema, yaitu “*war is inevitable, peace is temporary*”, dan inilah yang dikenal sebagai *Hobbes anarchy*. Namun demikian, dalam pandangan konstruktivisme, aktor dan struktur saling mempengaruhi (*mutually constructed*). Berdasarkan penjelasan ini, struktur sistem internasional adalah *a structure of shared ideas, as different shared ideas will cause different interests and actions*. Identitas tidak permanen atau tetap, namun dihasilkan melalui interaksi dari masyarakat internasional. Hanya setelah identitas ditentukan, maka kemudian kepentingan dapat didefinisikan. Dengan demikian, kepentingan nasional dapat berubah berdasarkan perubahan identitas.

Melalui mekanisme interaksi yang ada, karakter anarki yang berbeda dapat dijelaskan. Berdasarkan hakekat yang berbeda dari interaksi antar negara, terdapat beberapa budaya anarki dalam sistem politik internasional. Terdapat tiga budaya anarki yang berbeda dalam sistem internasional, yaitu *Hobbesian*, *Lockean* dan *Kantian*. Dalam budaya *Hobbesian*, negara tidak memiliki *shared idea* dan memandang negara lain sebagai musuh. Dalam konteks ini, negara cenderung mengambil tindakan keras untuk mengubah situasi saat ini dan memperlakukan satu sama lain sebagai musuh. Negara akan saling berupaya menghancurkan atau menaklukkan musuh-musuhnya. Kecenderungan pengambilan keputusan tidak mempertimbangkan prospek, namun lebih menyiapkan diri menghadapi situasi terburuk di masa depan. Kekuatan militer dianggap sebagai kekuatan utama. Jika perang terjadi, negara akan berperang dengan negara yang dianggap musuhnya, dan menggunakan kekerasan tanpa batas.

Bagi budaya *Lockean*, negara mungkin memiliki *shared ideas* dengan negara lain, dan memperlakukan negara lain sebagai pesaingnya. Budaya ini memandang apapun konflik yang terjadi, negara harus menghormati kedaulatan satu sama lain sebagai status quo. Negara pesaing tidak harus selalu melakukan eskalasi ketegangan karena hakekat dari perilaku yang rasional dari negara. Institusi kedaulatan menyebabkan resiko ini lebih rendah. Kekuatan militer bersifat relatif dan masih penting, dan pesaing mengetahui negara lain dapat menggunakan kekuatan militer. Jika konflik mengarah pada perang, negara pesaing akan membatasi penggunaan kekuatan militernya.

Sementara dalam budaya *Kantian*, jika suatu negara memperlakukan negara lain sebagai sahabat, negara ini akan mengembangkan *shared institutions* di antara mereka. Dalam kondisi budaya ini, negara mengharapkan satu sama lain untuk tidak menggunakan perang atau resiko perang guna menyelesaikan sengketa (*non-violence*). Selain itu, negara akan berjuang sebagai suatu tim apabila salah satu dari mereka terancam oleh pihak ketiga - *the rule of mutual help*.

Berdasarkan pandangan atau perspektif konstruktivisme di atas, dapat dipahami bagaimana kebijakan atau partisipasi Indonesia terhadap inisiatif IPEF dari Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Seperti halnya Wendt, terdapat perspektif baru untuk menjelaskan perilaku negara dalam konteks ini (Checkel, 1998) (Qin, 2001). Perspektif konstruktivis Wendt memperkuat pemahaman terhadap identitas, kepentingan, dan perilaku negara. Selain itu juga, memperluas pemahaman kondisi budaya anarki yang ada dalam sistem politik internasional

dan fenomena yang tidak dapat dijelaskan secara optimal oleh perspektif realisme maupun liberalisme.

Partisipasi Indonesia pada IPEF juga dapat dilihat dari perspektif kerja sama multilateral, yaitu bentuk kerja sama antara tiga atau lebih negara dengan aturan dasar yang harus dipatuhi secara universal (Ruggie, 1993). Kerja sama ini melihat semua negara memiliki konstruksi yang sama dalam menerima hasil kesepakatan yang setara, dimana tidak ada perbedaan negara prioritas atau negara yang lebih penting. Kerja sama multilateral ini berhasil menjadi cara yang paling bermanfaat untuk meningkatkan negosiasi antara banyak pihak, selain sebagai pendorong diplomasi bilateral (Djelantik, 2008).

Dalam kerja sama dengan negara lain terdapat strategi yang merefleksikan kepentingan domestik, dalam hal ini semua negara berhak untuk mempertahankan kekuasaannya dalam mencapai tujuan. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara di dunia internasional. Kebijakan luar negeri mempengaruhi kegiatan diplomasi dalam hal ini melakukan kerja sama bagi negara, maka diplomasi yang dilakukan negara-negara harus selalu sejalan dengan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian difokuskan pada perilaku negara dalam interaksi dengan negara lain dalam sistem politik internasional. Negara dihadapkan pada tantangan global dan menuntut melakukan kerjasama secara multilateral guna memenuhi kepentingan nasionalnya di tengah-tengah persaingan ideologi dan kepentingan dari neagara-negara besar di kawasan. Penelitian ini akan melakukan pengembangan teoretik secara deduktif dalam pengumpulan data yang akan mulai terbentuk pada konsep dan pola yang berkaitan dengan tema penelitian. Hal ini akan membawa fleksibilitas dalam proses pengumpulan data dan teori yang akan berinteraksi selama proses penelitian berlangsung (Neuman, 1997). Penelitian akan menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus yang merupakan kajian kebijakan Indonesia melakukan partisipasi pada forum multilateral tertentu di kawasan. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis dengan strategi (Yin, 2013) yaitu pertama, peneliti melakukan kompilasi data yang diperoleh dan menyusunnya sesuai dengan urutan waktunya, sehingga dapat dipahami skenarionya. Analisis ini dilakukan dengan melengkapi data, fakta dan informasi serta melakukan pengecekan dari berbagai sumber data yang pada akhirnya peneliti akan melakukan penilaian terhadap triangulasi sumber data dan informasi sebagai analisa akhir.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat empat prinsip utama dalam 4 (empat) pilar kerja sama IPEF, yaitu: Pilar I (*Trade*) yang di dalamnya terkait isu *connected economy* dengan mendorong terbentuknya standar dan aturan yang lebih tinggi untuk *digital trade*, seperti *cross-border data flows*. Pada Pilar II (*Supply Chain*) diharapkan dapat mendorong *resilient economy* dengan mewujudkan rantai pasok yang tangguh terhadap disrupsi yang tidak terduga, seperti pandemi COVID-19. Untuk Pilar III (*Clean economy*) dengan menargetkan pada komitmen dan proyek energi hijau. Sementara itu, berkenaan dengan Pilar IV (*Fair*) adalah untuk mendorong *fair economy* dengan penerapan perdagangan yang adil (*fair trade*), termasuk aturan terkait pemberantasan korupsi dan perpajakan yang efektif.

Berdasarkan *Statement on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (The House, 2022) dalam Pilar Perdagangan, para mitra IPEF akan berusaha merumuskan ketentuan berstandar tinggi dalam bidang-bidang yang mendasar bagi pertumbuhan ekonomi yang tangguh,

berkelanjutan, dan inklusif, termasuk tenaga kerja, lingkungan, ekonomi digital, pertanian, transparansi dan praktik regulasi yang baik, persaingan, inklusivitas, memfasilitasi perdagangan, dan bantuan teknis serta pembangunan ekonomi. Amerika Serikat dan para mitra IPEF akan berusaha merumuskan ketentuan standar tinggi yang menguntungkan pekerja dan memastikan perdagangan yang bebas dan adil yang berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dan yang berkontribusi secara bermakna pada perlindungan lingkungan hidup. IPEF berniat memajukan perdagangan digital inklusif dengan membangun lingkungan yang didasari rasa percaya dan keyakinan akan ekonomi digital, dengan cara mengatasi praktik-praktik diskriminatif, dan dengan mempromosikan aliran data lintas batas yang tepercaya dan aman. IPEF akan berusaha untuk memajukan ketahanan pangan dan praktik-praktik pertanian berkelanjutan serta manfaat dari praktik regulasi yang baik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akan berupaya ke arah pemanfaatan praktik-praktik terbaik yang berhubungan dengan fasilitasi perdagangan.

Dalam Pilar Rantai Pasokan, negara-negara akan berupaya mengkoordinasikan tindakan untuk mengurangi dan mencegah gangguan rantai pasokan di masa depan dan mengamankan sektor-sektor penting serta produk-produk utama untuk manufaktur. Amerika Serikat akan bekerja dengan para mitra IPEF untuk mengidentifikasi sektor-sektor serta produk-produk yang penting bagi keamanan nasional, ketahanan ekonomi, serta kesehatan dan keselamatan warga negara – dan kemudian bertindak secara kolektif untuk meningkatkan ketahanan sektor-sektor ini, menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi dalam industri-industri kunci masa depan. Para mitra akan mengidentifikasi sumber-sumber utama serta titik-titik sempit dalam rantai-rantai pasokan yang penting, dan bekerja secara kolektif untuk menanganinya dengan mendorong dan mendukung investasi dalam infrastruktur fisik dan digital baru. Para mitra akan menggunakan data untuk meningkatkan logistik rantai pasokan dan berinvestasi dalam peluang-peluang pelatihan dan pengembangan baru untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan memastikan bahwa semua warga negara berbagi manfaat dari peningkatan ketahanan rantai pasokan. Selain itu, negara-negara akan berusaha untuk memastikan bahwa upaya tersebut mempromosikan standar perburuhan yang mendukung rantai pasokan yang adil, berkelanjutan, dan tangguh.

Dalam Pilar Ekonomi Bersih, negara-negara akan berupaya untuk memperluas peluang investasi, memacu inovasi, dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat, pada saat yang sama para mitra membuka sumber energi bersih yang melimpah serta potensi penyerapan karbon yang cukup besar di kawasan ini. Para mitra bertujuan untuk memajukan kerja sama dalam bidang energi bersih dan teknologi ramah iklim, juga memobilisasi investasi serta mempromosikan penggunaan barang dan jasa rendah dan nol emisi. Pekerjaan ini akan menjadi bagian dari upaya berorientasi masa depan guna meningkatkan keamanan energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca secara keseluruhan. Para mitra berusaha untuk mempromosikan transisi yang adil dengan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan kita, termasuk sektor swasta, pekerja, dan masyarakat setempat.

Dalam Pilar Ekonomi yang Adil, negara-negara akan berusaha untuk menyamakan kedudukan bagi bisnis dan pekerja di negara-negara mitra dengan cara mencegah dan memerangi korupsi, mengekang upaya penghindaran pajak, serta meningkatkan transparansi, mengakui pentingnya keadilan, inklusivitas, aturan hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan berinovasi dan memperkuat pendekatan bersama untuk menerapkan langkah-langkah antikorupsi dan perpajakan, negara-negara mitra akan berupaya memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan arus niaga, perdagangan, serta investasi di antara negara IPEF sambil memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan makmur.

Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina M. Raimondo menyatakan IPEF akan menciptakan peluang ekonomi, memperbaiki kondisi tenaga kerja, serta mempromosikan keberlanjutan untuk seluruh perekonomian (The House, 2022). Sejak diluncurkan pada bulan Mei 2022, negara-negara IPEF telah terlibat dalam pembahasan intensif untuk mengetahui lingkup masing-masing pilar dari Kerangka ini. Pada akhir pertemuan para pejabat senior dan menteri, para mitra mencapai konsensus perihal pernyataan bersama para menteri tentang tiap-tiap keempat pilar IPEF: Perdagangan, Rantai Pasokan, Ekonomi Bersih, dan Ekonomi Adil. Kerangka ini akan mendorong ketahanan, keberlanjutan, inklusivitas, pertumbuhan ekonomi, keadilan, dan daya saing bagi ekonomi. Melalui IPEF, para mitra bertujuan untuk berkontribusi pada kerja sama, stabilitas, kemakmuran, pembangunan, dan perdamaian di kawasan ini. Kerangka ini juga akan menawarkan manfaat nyata yang mendorong kegiatan ekonomi dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta memberi manfaat bagi pekerja dan konsumen di seluruh kawasan ini.

Perspektif Konstruktivisme Indonesia terhadap IPEF

Konteks politik internasional kontemporer saat ini memiliki fokus dan perhatian pada pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan kesejahteraan. Nilai-nilai yang relevan pada IPEF dipandang relevan dalam upaya pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan bagi negara-negara berkembang. *Constructive engagement* yang inklusif penting dalam kerja sama negara berkembang yang menjadi *silent majority* dan *agenda follower* dalam pengambilan keputusan, terutama ketika berinteraksi dengan negara maju. Pendekatan *constructive engagement* memberikan ruang bagi negara berkembang untuk didengar dan memiliki posisi setara satu sama lain. Karakter inklusif dan intensifikasi dialog dalam skema kerja sama juga membuka peluang untuk penyelesaian masalah melalui pengutamaan dialog dan *policy sharing and learning*. Dialog intensif memperkuat posisi tawar ketika berinteraksi dengan negara maju dalam forum kerhja sama internasional dengan ruang lingkup lebih besar (Hutabarat, 2015).

Dalam konteks IPEF sebagai forum kerja sama, Indonesia perlu melihat dan menentukan sejauh mana tujuan yang akan dikejar oleh Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasional dan penting melihat dampak kebijakan yang dihasilkan oleh IPEF terhadap negara pemrakarsa (AS) dan juga Indonesia maupun negara-negara peserta lainnya. Keberlanjutan IPEF perlu diantisipasi oleh Indonesia, mengingat IPEF tidak mempunyai *congressional mandate* dan diputuskan pada level *executive order* sehingga perlu diperhatikan bagaimana dampak dinamika politik di AS terhadap Indonesia. Namun pada saat yang sama IPEF dapat menjadi wadah *policy framework* dan *norms setting* atau *cooperative mechanism* bagi negara berkembang di kawasan Indo-Pasifik.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam IPEF sangat politis dan bersifat strategis karena merupakan upaya Indonesia dalam menyeimbangkan kerja sama ekonomi antara RRT dan AS, mengingat terdapat beberapa kerja sama Indonesia dengan RRT di berbagai sektor yang tentunya perlu penegasan kepada dunia internasional bahwa Indonesia merangkul kedua negara besar tersebut. Pembahasan pada forum IPEF hingga saat ini juga masih terbatas sebagai forum diskusi / *brainstorming* untuk *norms-setting* yang tidak selalu bersifat mengikat, namun perlu diantisipasi oleh seluruh Kementerian/Lembaga bahwa proses pembahasan dalam forum IPEF akan terus berkembang dan dimungkinkan dapat berujung pada penyusunan suatu aturan yang bersifat mengikat di masa yang akan datang.

Dalam pembahasan di tiap pilar, terdapat upaya untuk membentuk *policy framework* yang bertumpu pada mekanisme yang ada, baik bilateral, regional, dan multilateral. Karenanya, penting bagi Indonesia dalam proses pembahasan tiap pilar untuk memperhatikan inisiatif-inisiatif yang bersifat institusionalisasi untuk menghindari duplikasi mekanisme yang telah terbentuk sebelumnya. Agar manfaat IPEF dapat dirasakan secara luas oleh negara-negara

peserta maupun kawasan, maka perlu juga senantiasa memasukkan perspektif dan kepentingan negara-negara berkembang dalam proses *norms-setting*. Pembahasan mengenai pilar-pilar kerja sama pada IPEF masih akan berlangsung di antara negara partisipan ke depannya. Setiap negara memiliki kepentingan dalam berbagai pilar yang ada, termasuk Indonesia. Dalam perspektif konstruktivisme perilaku negara dapat dibentuk dari interaksi sosial, identitas dan norma sosial (Walt, 1998). Kepentingan nasional negara juga merupakan hasil dari identitas sosial yang terbentuk melalui interaksi antar negara (Karen A. Mingst, 2017).

Pembahasan *norms-setting* dalam bidang perdagangan merupakan salah satu topik yang dapat berkaitan dengan kewajiban baru bagi negara maupun meliputi berbagai isu sensitif di dalamnya. Terdapat kemungkinan negara partisipan yang lebih mementingkan adanya *market access* atau pengurangan bea masuk dalam konsep yang akan dibahas. Namun juga dimungkinkan terdapat aspek sensitif di bidang tenaga kerja, aspek lingkungan maupun isu-isu lainnya dalam pilar perdagangan ini. Pilar yang ada juga dimungkinkan menambahkan kewajiban baru bagi negara berkembang sesuai kepentingan negara maju dalam perdagangan internasional. Namun di sisi lain, akses terhadap sistem perdagangan dan keuangan internasional juga merupakan kepentingan negara berkembang saat ini. Penguatan UMKM, termasuk peningkatan kemampuan dan literasi ekonomi digital (*digital economy*) merupakan salah satu area kerja sama yang menjadi perhatian ke depannya. Jumlah pengguna internet dan komunitas digital semakin meningkat secara signifikan pada masa pandemi COVID-19 karena hampir seluruh aktivitas dan kegiatan sehari-hari menggunakan atau berkaitan dengan pemanfaatan *cyberspace*. Menurut data dari Google-Temasek and Bain (2021), transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai US\$70 miliar.

Pada pilar *Supply Chain*, terdapat berbagai aspek sensitif bagi negara berkembang terkait akses terhadap sumber daya alam yang ada. Namun di sisi lain, terdapat kepentingan negara berkembang untuk melakukan proses hilirisasi industri yang ada. Adanya kepentingan terhadap keterbukaan informasi rantai pasok dari masing-masing negara pada saat yang sama juga memerlukan perhatian pada aspek keamanan informasi teknologi. Selain itu juga terdapat kepentingan negara berkembang terhadap peningkatan investasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang terdapat di negara-negara berkembang. Selain itu, juga terdapat permasalahan mendasar *supply chain* di negara-negara berkembang, seperti kurangnya pembiayaan dan lemahnya konektivitas.

Berkaitan dengan pilar *Clean Economy*, terdapat kepentingan berkenaan dengan infrastruktur dan dukungan sumber daya keuangan bagi pembangunan energi baru dan terbarukan yang menekankan pada pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular. Prinsip *clean economy*, tidak hanya kepentingan bagi negara maju, namun bagi negara berkembang masih banyak terdapat tantangan terkait kerja sama penyediaan sumber daya EBT yang terjangkau dan dapat diakses banyak pihak, kerja sama investasi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, maupun kerja sama penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi pangan yang ramah lingkungan.

Sementara terkait Pilar 4 tentang *Fair Economy* yang meliputi anti korupsi dan perpajakan, aspek pemberantasan korupsi merupakan salah satu kebijakan prioritas Indonesia. Inisiatif dalam bidang anti korupsi dalam kerangka IPEF perlu merujuk pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan tidak merupakan duplikasi dari UNCAC maupun upaya-upaya turunannya. Pada skala nasional, terdapat urgensi untuk membangun infrastruktur keamanan siber yang tangguh dan berfungsi dengan baik di Indonesia, termasuk melalui pembentukan suatu regulasi yang komprehensif tentang keamanan siber dan keamanan digital serta perlindungan data pribadi. Pada waktu yang sama di tahun 2021, BSSN melaporkan 1,6 miliar kasus serangan siber. Jumlah serangan tersebut merupakan rekor serangan siber tertinggi sejak BSSN dibentuk pada tahun 2017. Sementara itu, BSSN juga

menyebutkan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) telah menyebabkan kerugian sebesar US\$34,2 miliar bagi Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan kepentingan nasional Indonesia, diplomasi yang dilakukan Indonesia pada IPEF bersifat politis dan strategis dalam upaya untuk melakukan perimbangan kepentingan (*balance of interests*) kerja sama ekonomi antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, keterlibatan dalam pembentukan *policy framework* dan *norms setting* atau *cooperative mechanism* bagi negara berkembang di kawasan, serta upaya untuk memperjuangkan kepentingan sentralitas ASEAN sesuai *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP).

Adanya keterkaitan antara pilar I, II, III, dan IV, perlu dipertimbangkan agar Indonesia dapat bergabung di pembahasan seluruh pilar dengan pertimbangan bahwa seluruh pilar yang ada pada IPEF memiliki keterkaitan satu sama lain (*mutually reinforcing*). Indonesia perlu berpartisipasi dalam pembahasan seluruh pilar agar tidak kehilangan benang merah dari isu-isu yang dibahas pada setiap pilar IPEF yang ada. Partisipasi Indonesia pada keempat pilar tersebut untuk mengawal kepentingan Indonesia pada setiap pilar, termasuk kepentingan bagi negara berkembang.

Indonesia juga perlu mengambil peran aktif dalam proses pembentukan norma pada IPEF. *Norm-setting* yang ada dapat terkait isu-isu seperti *digital economy*, *seamless border protection*, *SPS*, *indigenous people*, *digital trade*, *artificial intelligence*, dan hal-hal lain yang memiliki karakter teknis, memerlukan *engagement* aktif dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri untuk memperoleh pemahaman terhadap kebijakan terkait isu-isu tersebut baik di dalam negeri maupun di luar negeri. IPEF dimungkinkan dapat mengarah pada pembentukan *policy framework* dan *norms setting* atau *cooperative mechanism* bagi negara berkembang di kawasan

IPEF diharapkan dapat menghasilkan kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh negara-negara peserta, terutama bagi negara-negara berkembang. IPEF harus bersifat inklusif dan terbuka bagi semua negara di kawasan karena kerja sama ini dinilai bermanfaat bagi seluruh negara di kawasan Indo-Pasifik. IPEF diharapkan tidak menciptakan tantangan-tantangan pembangunan baru bagi negara-negara di kawasan. Penerapan norma-norma dan standar-standar dalam kerja sama ekonomi harus didukung dengan program-program pengembangan kapasitas untuk memastikan bahwa semua negara di kawasan dapat berpartisipasi sepenuhnya. IPEF harus mendorong sinergi antara IPEF dan *ASEAN Outlook on Indo Pacific* (AOIP), dengan memasukkan prinsip-prinsip AOIP antara lain sentralitas ASEAN, keterbukaan, transparansi, dan inklusivitas, dengan berdasarkan asas kesetaraan dan saling menguntungkan. Partisipasi Indonesia pada IPEF menjadi salah satu upaya untuk memperjuangkan kepentingan sentralitas ASEAN sesuai *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP).

Dari kerja sama IPEF diharapkan dapat mendorong hasil konkrit kerja sama, untuk Perdagangan dan Ekonomi Digital, antara lain melalui investasi dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro dan Kecil Menengah serta akses pasar dan permodalan. Terkait Rantai Pasok, antara lain melalui pengembangan integrasi rantai pasok secara vertikal dan horisontal, kerja sama sistem logistik dan interkoneksi, dan pengembangan investasi industri hilir, dan energi bersih, dekarbonisasi, dan sektor infrastruktur, antara lain melalui pengembangan kemitraan untuk proyek-proyek konektivitas sesuai dengan AOIP. Dengan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa terdapat perspektif konstruktivisme "*shared ideas*" yang dikembangkan oleh Alexander Wendt dalam Diplomasi Indonesia pada *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) dalam konteks *Kantian culture*.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih khusus diberikan kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Dr. Hulman Panjaitan, SH., MH, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Pemasaran, Juaniva Sidharta, SE., M.Si., Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Hukum, Dr. Lisa Gracia Kailola, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Dr. Verdinand Robertua, S.Sos., M.Soc.Sc., atas dukungannya dalam Konvensi Nasional XIII Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) 2022, sehingga artikel ini dapat disampaikan dalam konvensi nasional.

Referensi

- ASEAN (2022) Joint Vision Statement ASEAN-U.S. Special Summit
- ASEAN (2019) ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
- Alker, Hayward R (2000) 'On the learning from Wendt'. *Review of International Studies* 26 (1), 141-150.
- Barkin, J. Samuel (2000) 'Realist, Constructivism, and International Relations Theory'. *The annual meeting of the American Political Science*.1.
- Checkel, Jeffrey (1998) 'Review: The Constructivist Turn in International Relations Theory', *World Politics* 50 (2), 324-348.
- CNBC (2022) The Indo-Pacific Economic Framework: What it is - and why it matters
- Djelantik, Sukawarsini (2008) *Diplomasi : Antara Teori & Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fearon, James (1997) 'What is identity (as we now use the word)?', manuscript, University of Chicago.
- Griffiths, Martin (1999) *Fifty Key Thinkers in International Relations*. New York : Routledge.
- Google, Temasek and Bain (2021) *e-Conomy SEA 2021, Roaring 20s : the SEA Digital Decade*.
- Guzzini, Stefano; Leander, Anna (2001) 'A social theory for international relations: An appraisal of Alexander Wendt's theoretical and disciplinary synthesis'. *JIRD* 4(4), 316-338.
- Hopf, Ted (1998) 'The Promise of Constructivism in International Relations Theory'. *International Security* 23(1), 171-200.
- Hutabarat, Leonard (2015) *Konstruktivisme Politik Internasional*, Pikiran Rakyat, 24 April.
- Hutabarat, Leonard (2014) *Bangkitnya Kekuatan Geopolitik*, Kompas, 31 Juli.
- Jackson, Robert; Sorensen, Georg (2007) *Introduction to International Relations Theories and Approaches Dritte Edition*, Oxford: Oxford University Press.
- Lapid, Yosef (1989) 'The Third Debate: On the Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era'. *International Studies Quarterly* 33(3), 235-254.
- Martha Finnemore (1996) *National Interests in International Society First Edition*. Ithaca: Cornell University Press.
- Mengshu, Zhan (2020) *A Brief Overview of Alexander Wendt's Constructivism*.
- Mingst, Karen A. (2017) *Essentials of International Relations. Seventh Edition*. New York: W.W. Norton & Company.
- Neuman, William (1997) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*
- Qin, Yaqing (2001) 'Social, Constructivism of International Politics'. *Europe* 3, 34-12.
- Ruggie, John Gerard (1993). *Multilateralism Matters: The Theory and Praxis on an International Form*. New York: Columbia University Press.
- Sarina Theys (2017) *Constructivism*. In Stephen McGlinchey (Ed), *International Relations Theory* (P. 36-41). E-International Relations.
- Walt, Stephen M (1998) *International Relations: One World, Many Theories*. Foreign Policy 110 (Spring).

- Waltz, Kenneth (1979) *Theory of International Politics*. First Edition. Boston: Addison-Wesley.
- Wendt, Alexander (1999) *Social Theory of International Politics*. First Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wendt, Alexander (1992) 'Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics'. *International Organization* 2, 391-425.
- Wildavsky, Aaron (1994) 'Why Self-Interest Means Less Outside of A Social Context'. *Journal of Theoretical Politics* 6 (2), 131-159.
- The House, White (2022) Statement on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity
- Yadav, Abhiram S. (2022) *Indo-Pasifik : Sebuah Konstruksi Geopolitik*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Yin, R.K. (2013) *Case Study Research: Design and Methods*. Sage Publications, Thousand Oaks.



PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

ROOM 1

Subtema: Diplomasi Kontemporer dan Politik Luar Negeri Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik

Sesi 1 (14.00-15.30 WITA)

NO.	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	JUDUL ABSTRAK
1.	14.00-14.10 WITA	Leonard Felix Hutabarat, S.IP., M.Si., Ph.D	Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta	Prespektif Konstruktivisme dalam Diplomasi Indonesia pada <i>Indo-Pacific Economic Framework</i> (IPEF)
2.	14.10-14.20 WITA	Arthuur Jeverson Maya	Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta	Diplomasi Alien: Mediasi Keterasingan di Asia Tenggara
3.	14.20-14.30 WITA	Siti Mutiah Setiawati	Universitas Gadjah Mada	Tantangan Indonesai dalam Mengembangkan Kerjasama Indo-Pasifik
14.30-14.45 WITA		Diskusi		
4.	14.45-14.55 WITA	Andi Ismira, Gia Ayu Fita, M.Rizky Prawira, Dian Pertiwi	Universitas Sulawesi Barat	Pembangunan Hijau dan Investasi Nikel Tiongkok di Indonesia: Sebuah Analisis Kedaulatan Energi dan Keamanan Lingkungan
5.	14.55-15.05 WITA	Made Selly Dwi Suryanti	Universitas Cenderawasih	Diplomasi Digital Indonesia Sebagai Alat Promosi Pariwisata Raja Ampat
6.	15.05-15.25 WITA	Sukawarsini Djelantik	Universitas Katolik Parahyangan	Diplomasi Digital Indonesian Untuk Melindungi Pekerja Migran
15.25-15.40 WITA		Diskusi		



PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

Sesi 2 (15.45-18.00 WITA)

NO.	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	JUDUL ABSTRAK
1.	15.45-15.55 WITA	Penny Kurnia Putri S.Sos., M.A	Universitas Udayana	Indonesia Sebagai Arena Strategis Geo-ekonomi Dunia
2.	15.55-16.05 WITA	Pazli Mahyuddin	Universitas Riau	Diplomasi Indonesia dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif; Keteguhan Sikap ditengah bertumbuhnya Identitas Nasional di Kawasan Asia
3.	16.15-16.25 WITA	Yusnarida Eka Nizmi	Universitas Riau	Perilaku Food Waste Dalam Konstelasi Empat Pilar Keamanan Pangan di Indonesia
	16.25-16.40 WITA		Diskusi	
4.	16.40-16.50 WITA	Khairunnisa Simbolon, S.IP.,MA	Universitas Lampung	Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia sebagai Respon Indonesia dalam Dinamika Kawasan Indo-Pasifik
5.	16.50-17.00 WITA	Dr. Zulfikri Suleman, M.A, Abdul Halim, S.IP., M.A	Universitas Sriwijaya	Indonesia, Amerika Serikat dan Tiongkok Dalam Kerangka Indo-Pasifik
6.	17.00-17.10 WITA	Kevin Ali Sesarianto	Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta	Mendayung (Memanipulasi Wacana) di

*Indonesia dalam Konstelasi Ekonomi, Politik, Sosial Budaya,
dan Pertahanan Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik*



PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

				antara Dua Karang: Discursive Balancing Indonesia dalam Indo- Pasifik
	17.10-17.25 WITA		Diskusi	
7.	17.25-17.35 WITA	Dr. Melyana R. Pugu, S.IP.,_M.Si	Universitas Cenderawasih	Era Baru Kemitraan Indonesia-Pasifik Mungkinkah Papua menjadi <i>Hub</i> dalam kerangka Diplomasi Indonesia di Pasifik
8.	17.35-17.45 WITA	Mariana Buiney	Universitas Cenderawasih	Kepentingan Indonesia di Negara-Negara Pasifik
9.	17.45-17.55 WITA	Dr. Rahmi Fitriyanti, S.Sos., M.Si.	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Strategi <i>Naval Diplomacy</i> Terhadap Agresivitas Cina Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara
10.	17.55-18.05 WITA	Meyland S.F. Wambrau, Claudia C.Renyoet	Universitas Cenderawasih	Upaya Indonesia dan negara-negara pasifik dalam menghadapi Perubahan Iklim Melalui <i>Pacific Island Forum (PIF)</i>
	18.05-18.20 WITA		Diskusi	

Indonesia dalam Konstelasi Ekonomi, Politik, Sosial Budaya,
dan Pertahanan Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik



**PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA**

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

ROOM 2

Subtema: Diplomasi Kontemporer dan Politik Luar Negeri Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik

Sesi 1 (14.00-15.30 WITA)

NO.	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	JUDUL ABSTRAK
1.	14.00-14.10 WITA	Rika Isnarti	Universitas Pertamina	A Systematic Review In Science Diplomacy
2.	14.10-14.20 WITA	Asra Virgianita	Universitas Indonesia	Pandangan Milenial Indonesia Terhadap Posisi Ekonomi Dan Keamanan Indonesia Dalam Geopolitik Rivalitas As-Tiongkok
3.	14.20-14.30 WITA	Deasy Silvyia Sari	Universitas Padjajaran	Diplomasi Vaksin Indonesia ke Indo-Pasifik: Peluang & Tantangan
	14.30-14.45 WITA	Diskusi		
4.	14.45-14.55 WITA	Arry Bainus, Deasy Silvyia Sari, Dina Yulianti, Savitry Aditiani, Ali Zahid, Rifia	Universitas Padjajaran	Keamanan Kesehatan di Indo-Pasifik: sebuah Prospek untuk Indonesia
5.	14.55-15.05 WITA	Dr. Hendra Maujana Saragih	Universitas Nasional	Harapan dan Tantangan Indonesia Menjadi Ketua ASEAN 2023
6.	15.05-15.25 WITA	Yusep Ginanjar	Universitas Jenderal Ahmad Yani	Dampak Dinamika Politik Kawasan Indo-Pasifik

*Indonesia dalam Konstelasi Ekonomi, Politik, Sosial Budaya,
dan Pertahanan Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik*



PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

				Terhadap Keamanan Pertahanan Indonesia
	15.25-15.40 WITA		Diskusi	

Sesi 2 (15.45-18.00 WITA)

NO.	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	JUDUL ABSTRAK
1.	15.45-15.55 WITA	Nurul Isnaeni, Marwan	Universitas Indonesia	Tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Dinamika Kerjasama Ekonomi Indo-Pasifik: Mencermati Peran Kepemimpinan Indonesia dan Sentralitas ASEAN
2.	15.55-16.05 WITA	Andi Meganingratna	Universitas Fajar	Dampak Impor Beras Dari Vietnam Tahun 2017-2021 Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia
3.	16.15-16.25 WITA	Sannya Pestari Dewi, Seftina Kuswardini	Universitas Amikom Yogyakarta	Diplomasi Digital Indonesia dalam Membentuk Nation Branding ke Kawasan Indo-Pasifik
	16.25-16.40 WITA		Diskusi	
4.	16.40-16.50 WITA	Anita Munafia	Paramadina Graduate School of Diplomacy	Diplomasi Kontemporer dan Politik Luar Negeri Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik
5.	16.50-17.00 WITA	Yesi Ariani Bahar	Universitas Paramadina	Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia Dengan Australian Border Force (ABF) Dalam Pelaksanaan Joint Declaration On Maritime Cooperation Melalui Plan Of

*Indonesia dalam Konstelasi Ekonomi, Politik, Sosial Budaya,
dan Pertahanan Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik*



PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

				Action Pada Periode 2020-2021
6.	17.00-17.10 WITA	Fredy B.L. Tobing	Universitas Indonesia	Negara, Foreign Direct Investment, dan The Ease of Doing Business di Indonesia, Singapura, dan Vietnam: Sebuah Pembelajaran
	17.10-17.25 WITA	Diskusi		
7.	17.25-17.35 WITA	Vincensius Dion P. Ginting	Universitas Lampung	ASEAN Outlook on Indo-Pacific sebagai Respon akan Kehadiran The Quadrilateral Security Dialogue di Kawasan Indo-Pasifik
8.	17.35-17.45 WITA	Novita Dwi Setya Ningsih	Universitas Sriwijaya	Strategi Peningkatan Nilai Kompetitif Produk Porang Indonesia Di Pasar Global Melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 (Studi Kasus: Larangan Ekspor Bibit Porang)
9.	17.45-17.55 WITA	Adi Rio Arianto	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Manunggalism, Indonesian School, and Eastern World Relations Theory (WRT): A Way to View the World Order in Manunggalian Era 21st Century
	17.55-18.05 WITA	Diskusi		



PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

ROOM 3

Subtema: • Konstruksi Keamanan Regional Indo-Pasifik Menghadapi Dinamika Global • Dinamika Interaksi Antar Kawasan Eropa dan Indo Pasifik • Isu-isu Perbatasan antar Negara di Kawasan Indo Pasifik

Sesi 1 (14.00-15.30 WITA)

NO.	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	JUDUL ABSTRAK
1.	14.00-14.10 WITA	Hendrini Renolafitri, S.IP, MA	Universitas Riau	Peran UNHCR dalam Penanganan Pengungsi di Kota Pekanbaru 2017-2021
2.	14.10-14.20 WITA	Dr. Rizal A.Hidayat, S.IP., MM.,	Universitas Al-Azhar Indonesia	Kemitraan Strategis India-ASEAN Melalui Arsitektur Keamanan Regional Asia Tenggara Dalam Kontestasi Politik Keamanan AS-Tiongkok Di Laut China Selatan
3.	14.20-14.30 WITA	Hestutomo Restu Kuncoro, Dyah Lupita Sari	UPN "Veteran" Yogyakarta	Mapping the Trade Dynamics between Indo-Pacific and Europe using Network Theory
14.30-14.45 WITA		Diskusi		
4.	14.45-14.55 WITA	Muhammad Arsy Ash Shiddiqy	Universitas Islam Riau	Pergeseran Pasukan Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik dan Dampaknya Bagi Indonesia
5.	14.55-15.05 WITA	Roby Rakhmadi	Universitas Lampung	Upaya Indonesia Mendamaikan Konflik Rusia-Ukraina 2022 sebagai Perwujudan Politik

*Indonesia dalam Konstelasi Ekonomi, Politik, Sosial Budaya,
dan Pertahanan Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik*



PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

				Luar Negeri yang Bebas Aktif
6.	15.05-15.25 WITA	Satria Rizaldi Alchatib, S.IP., MA	Universitas Slamet Riyadi	Rethinking Indonesia's Indo-Pacific Vision: Strategic Convergence or Regional Security Reset
	15.25-15.40 WITA	Diskusi		

Sesi 2 (15.45-18.00 WITA)

NO.	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	JUDUL ABSTRAK
1.	15.45-15.55 WITA	Pradono Budi Saputro, M.Si.	Universitas Satya Negara Indonesia	Indo-Pasifik sebagai Regional Security Complex dan Pengaruhnya dalam Pembentukan AUKUS
2.	15.55-16.05 WITA	Ignatius Ismanto	Universitas Pelita Harapan	ASEAN, Australia dan Indo Pasifik
3.	16.15-16.25 WITA	Dr. Yessi Olivia	Universitas Riau	Respon Negara-negara ASEAN terhadap Perang Rusia-Ukraina
	16.25-16.40 WITA	Diskusi		
4.	16.40-16.50 WITA	Emil Radhiansyah, Hizra Marisa, Asriana Issa Sofia	Universitas Paramadina	Efektivitas Strategi Indo Pacific Amerika Serikat Terhadap China
5.	16.50-17.00 WITA	Dr. Rendi Prayuda, S.IP, <u>M.Si</u> , Muhammad Riezki Adma Jayandi, Rio Sundari, Cifebrima Suyastri, Fitrisia Munir	Universitas Riau	Sinergisitas Pengembangan Sistem Pertahanan dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non Militer di Wilayah Perbatasan



PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

				Provinsi Riau
6.	17.00-17.10 WITA	Nikolaus Loy, Iva Rachmawati.	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	Kerjasama Energi Dan Stabilitas Kawasan Indo Pacific
	17.10-17.25 WITA	Diskusi		
7.	17.25-17.35 WITA	Eska Dwipayana	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Uni Eropa Sebagai Sumber Alternatif Pendanaan Baru Bagi Negara Negara Indo Pasifik Meninggalkan China
8.	17.35-17.45 WITA	Novriest Umbu Walangara Nau	Universitas Kristen Satya Wacana	Diplomasi Kemanusiaan dalam Lanskap Keamanan Regional Asia Tenggara: Peran ASEAN dalam Krisis Kemanusiaan Pasca Kudeta Militer Myanmar pada Tahun 2021
9.	17.45-17.55 WITA	Irma Indrayani	Universitas Nasional	Regionalism And Globalization In International Political Economy Study Case: European Union-Indonesia Cooperation In Sustainable Development Goals (SDGs)
	17.55-18.10 WITA	Diskusi		
10.	18.10-18.20 WITA	Sugeng Riyanto	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Kegagalan Rusia dalam Invasi Ukraina: Perspektif Moralitas Perang

Indonesia dalam Konstelasi Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik



PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

11.	18.05-18.15 WITA	Yusli Effendi	Universitas Brawijaya	Securitization Of Extremism/Radicalism In Indonesia Under Joko Widodo (2016-2020)
12.	18.15-18.25 WITA	Gita Karisma	Universitas Lampung	Geopolitical Codes Asia Tenggara dalam Geopolitical Structures Indo-Pasifik
	18.25-18.40 WITA	Diskusi		

*Indonesia dalam Konstelasi Ekonomi, Politik, Sosial Budaya,
dan Pertahanan Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik*



**PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA**

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

ROOM 4

Subtema: • Interkoneksi Tematik Timur Tengah dan Indo pasifik • Indonesia, Islam dan Indo-Pasifik • Gender Equality, Disability and Social Inclusion di IndoPasifik

Sesi 1 (14.00-15.30 WITA)

NO.	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	JUDUL ABSTRAK
1.	14.00-14.10 WITA	Ardhitya Eduard Yeremia	Universitas Indonesia	The roles of Indonesian Muslim China Graduates in promoting the "alternative" narratives of China: An analysis on China's soft power projection in Indonesia
2.	14.10-14.20 WITA	Maulana Rifai	Universitas Singaperbangsa Karawang	Peran Militer dan Kelompok Keagamaan dalam Proses Demokratisasi: Studi Kasus Indonesia, Thailand Dan Myanmar
3.	14.20-14.30 WITA	Yeyen Subandi	Universitas Respati Yogyakarta	Analisis Bibliometrik dan Visualisasi Artikel Kesetaraan Gender di Kawasan Indo-Pasifik
14.30-14.45 WITA		Diskusi		
4.	14.45-14.55 WITA	Helga Yohana Simatupang, M.A	Universitas Potensi Utama	Kemitraan Indonesia-Uni Emirat Arab Melalui Kesepakatan IUAE-CEPA (Indonesia-United Arab

*Indonesia dalam Konstelasi Ekonomi, Politik, Sosial Budaya,
dan Pertahanan Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik*



**PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA**

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

				Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement)
5.	14.55-15.05 WITA	Dwi Ardhanariswari Sundrijo, Ph.D	Universitas Indonesia	The Strategic Impact of Regional Norms on the Establishment Process of ASEAN Human Rights Mechanisms (AICHR)
6.	15.05-15.25 WITA	Danial Darwis, S.IP., M.A	Universitas Cenderawasih	Peran PBNU Sebagai Salah Satu Organisasi Islam di Indonesia dalam Aktivitas Diplomasi Internasional di Kawasan Indo-Pasifik
	15.25-15.40 WITA	Diskusi		

Sesi 2 (15.45-18.00 WITA)

NO.	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	JUDUL ABSTRAK
1.	15.45-15.55 WITA	Adrianus Lengu Wene	Universitas Kristen Indonesia	Menggugat Ketidakberdayaan Prekariat Indonesia Di Indo-Pasifik Studi Kasus: Ketersanderaan Diri Tenaga Kerja Indonesia Dalam Jerat Rezim Pengetahuan Korporatokrasi
2.	15.55-16.05 WITA	Hasbi Aswar	Universitas Islam Indonesia	Perspektif Muslim Indonesia terhadap Rivalitas AS - China di Kawasan Indo- Pasifik.

Indonesia dalam Konstelasi Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik



PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

3.	16.15-16.25 WITA	Ni Nyoman Clara Listya Dewi	Universitas Udayana	The Importance of Reducing Labor Market Gender Segregation in the Indo Pacific Region
16.25-16.40 WITA		Diskusi		
4.	16.40-16.50 WITA	Ferdiansyah R	Universitas Sriwijaya	Peran NGO Perempuan Dalam Penanggulangan Persoalan Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang
5.	16.50-17.00 WITA	Rizki Dian Nursita	Universitas Islam Indonesia	Critical Discourse Analysis on Islam Nusantara in Indonesia's Foreign Policy
6.	17.00-17.10 WITA	Yuni R. Intarti	Universitas Indonesia	Pojok Literasi ASEAN di Sekolah: Upaya Meningkatkan Pengetahuan Siswa Sekolah tentang ASEAN
17.10-17.25 WITA		Diskusi		
7.	17.25-17.35 WITA	Dini Septyana Rahayu	Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo	Perkembangan Studi Hubungan Internasional Islam Di Indonesia Di Tengah Perdebatan Epistemologis Dan Metodologis
8.	17.35-17.45 WITA	Broto Wardoyo	Universitas Indonesia	Pertukaran peran hegemonik kawasan antara Amerika Serikat dan Cina: Pivot to Asia versus Belt and Road in the Middle East
9.	17.45-17.55 WITA	Afni Regita Cahyani Muis	Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo	Penerapan Rantai Nilai Halal Sebagai Kepentingan Ekonomi dan Human Life Security: Potensi Rantai Nilai Halal Indonesia Di Kawasan Indo-Pasifik
17.55-18.10 WITA		Diskusi		

*Indonesia dalam Konstelasi Ekonomi, Politik, Sosial Budaya,
dan Pertahanan Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik*



PANITIA PELAKSANA
KONVENSI NASIONAL XIII
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Sekretariat: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
E-mail: vennas13aihi@gmail.com

10.	18.10-18.20 WITA	Dra. Umi Oktyari Retnaningsih, MA,PhD	Universitas Riau	Kesejahteraan Perempuan Indo-Pasifik: Kenyataan dan Harapan
11.	18.15-18.25 WITA	Seniwati, M.Hum., P.hD	Universitas Hasanuddin	Assessing Religious Organization Empowerment Programs For Preventing Radicalism In Indonesia
	18.25-18.40 WITA		Diskusi	

*Indonesia dalam Konstelasi Ekonomi, Politik, Sosial Budaya,
dan Pertahanan Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik*

SERTIFIKAT

No: 001/Pan-Vennas-XIII/Hi.UH/XI/2022

Diberikan kepada :

Leonard Felix Hutabarat, S.IP., M.Si., Ph.D.

atas partisipasinya sebagai

PEMAKALAH PADA SIDANG AKADEMIK

dalam kegiatan **KONVENSI NASIONAL** Asosiasi Ilmu Hubungan
Internasional Indonesia XIII

Pada tanggal 21-24 November 2022
di Makassar

Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional
Indonesia (AIHII) Periode 2020-2023



Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag., M.Si

Ketua Departemen HI UNHAS



Drs. H. Darwis, MA., Ph.D